

## 10 Dash Line Sebagai Penguatan Pengaruh Tiongkok di Taiwan

**Ahmad Haris Kurnia**

Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
[ahmad.haris.isip21@mail.umy.ac.id](mailto:ahmad.haris.isip21@mail.umy.ac.id)

**Imam Mahdi**

Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
[mahdi@umy.ac.id](mailto:mahdi@umy.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan 10 Dash Line digunakan sebagai strategi penguatan pengaruh Tiongkok terhadap Taiwan. Dengan menggunakan teori realisme ofensif dari John J. Mearsheimer, penelitian ini menganalisis bahwa Tiongkok, berdasarkan prinsip realisme ofensif, menggunakan kebijakan 10 Dash Line untuk memperkuat klaim teritorialnya terhadap Taiwan yang dianggap sebagai bagian integral dari Republik Rakyat Tiongkok dan meningkatkan tekanan militer serta psikologis untuk memastikan pengakuan atas kedaulatan tersebut. Namun, upaya Tiongkok untuk memperkuat klaimnya atas Taiwan terhalang oleh intervensi Amerika Serikat, yang melalui aliansi seperti AUKUS dan Quad berupaya membendung ambisi Tiongkok untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di kawasan ini.. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan 10 Dash Line berfungsi sebagai instrumen Tiongkok dalam memperkuat pengaruhnya di Taiwan, namun kehadiran Amerika Serikat dan sekutunya menjadi penghalang signifikan bagi dominasi Tiongkok di kawasan tersebut.*

**Kata Kunci:** 10 Dash Line; Taiwan; Tiongkok; Amerika Serikat.

### Abstract

*This research examines how the 10 Dash Line policy is used as a strategy to strengthen China's influence over Taiwan. Using John J. Mearsheimer theory of offensive realism, this study analyzes how China employs the 10 Dash Line policy to reinforce its territorial claims in the South China Sea and increase military and psychological pressure on Taiwan. This policy is not only aimed at asserting China's historical claims but also as strategic effort to pressure Taiwan into returning under China's control. However, China's dominance is hindered by the intervention of the United States, which, through alliances like AUKUS and Quad, seeks to contain China's expanding power and provide military and diplomatic support to Taiwan. This research indicates that the 10 Dash Line policy serves as an instrument for China to strengthen its influence over Taiwan, but the presence of United States and its allies presents a significant obstacle to China's dominance in the region.*

**Keywords:** 10 Dash Line; Taiwan; China; United States.

## 1. Pendahuluan

Kawasan Asia Pasifik telah menjadi panggung penting bagi dinamika geopolitik global, dengan persaingan kekuatan besar yang semakin terasa di wilayah tersebut. Salah satu isu yang memunculkan ketegangan dan perdebatan yang intens adalah ketegangan antara Tiongkok-Taiwan. Ketegangan tersebut bermula ketika Partai Republic of China (ROC), juga dikenal sebagai partai nasionalis, digulingkan oleh Chinese Communist Party (CCP), yang sekarang lebih dikenal dengan Partai Republik Rakyat Tiongkok (RRT), ke wilayah Taiwan pada tahun 1949 (Goldstein, 2015: 7).

Akibatnya, muncul ketidaksenangan terhadap daratan utama yang dilontarkan oleh Taiwan. Selain paham ideologi yang berbeda di mana Taiwan meyakini sistem demokrasi sedangkan Tiongkok meyakini komunis, pengusiran tersebut menjadi faktor tambahan yang menjadikan Taiwan berencana untuk lepas dari genggaman Tiongkok. Akhirnya timbul gesekan antara kedua belah pihak yang menjadi isu panas sampai sekarang di mana Taiwan ingin menjadi negara berdaulat dan Tiongkok ingin mengakuisisi Taiwan.

Pada dasarnya, Tiongkok memang tidak pernah mengakui kedaulatan Taiwan. Namun, ironisnya Taiwan juga mengakui bahwa wilayahnya merupakan bagian integral dari Tiongkok walaupun ada perbedaan pemerintahan mana yang mengatur wilayah Taiwan tersebut (Goldstein, 2015: 50-51). Dalam konteks masalah ini, Tiongkok melihat dirinya sebagai pemerintahan yang sah untuk menyatukan Daratan Utama dan Taiwan. Meskipun, sejak revolusi komunis sampai sekarang. Hal itu masih belum dapat terealisasikan.

Selain klaim kedaulatan, isu-isu ekonomi, militer, dan politik juga menjadi pendorong ketegangan antara kedua pihak. Tiongkok secara aktif mengembangkan kekuatan militer dan ekonominya, sementara Taiwan terus mencari dukungan internasional dan memperkuat posisinya dalam hubungan luar negeri. Perkembangan ini memperkeruh ketegangan di kawasan, dengan kedua belah pihak saling berusaha memperkuat pengaruh mereka di wilayah tersebut.

Ketegangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik terus meningkat, khususnya terkait klaim teritorial Tiongkok atas Taiwan. Salah satu isu yang semakin memanas situasi adalah pengumuman resmi Tiongkok tentang peta baru dengan klaim 10 Dash Line pada Agustus 2023 (Clayman, 2023). Garis tambahan ini mempertegas niat Tiongkok untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut. 10 Dash Line merupakan perkembangan dari 9 Dash Line yang sebelumnya diajukan Tiongkok pada 1953 setelah melakukan penghapusan 2 garis putus-putus (Gao & Jia, 2013). Peta terbaru ini menunjukkan klaim tegas atas sebagian besar Laut China Selatan dan wilayah yang dekat dengan Taiwan. Dengan langkah ini, Tiongkok semakin menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian integral dari kedaulatannya.

Kebijakan ini tidak hanya memperlihatkan ambisi Tiongkok untuk menyatukan Taiwan dengan daratan utama, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran baru. Taiwan, yang sudah lama berupaya menjaga kedaulatannya, melihat klaim tersebut sebagai ancaman serius terhadap integritas teritorialnya. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Taiwan telah menjadi pusat konflik antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Republik Tiongkok (Taiwan) (Tsang, 2004: 3). Perbedaan ideologi antara komunis di Tiongkok dan demokrasi di Taiwan semakin

memperlebar jurang di antara keduanya. Klaim 10 Dash Line semakin memperburuk hubungan tersebut.

Peta baru ini juga menjadi sinyal jelas dari Tiongkok kepada dunia, khususnya Amerika Serikat dan sekutu Taiwan, bahwa reunifikasi adalah prioritas nasional yang tidak dapat ditawar. Langkah ini semakin memperkuat tekanan terhadap Taiwan, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun militer. Bagi Tiongkok, 10 Dash Line tidak hanya didasarkan pada klaim historis sejak era Dinasti Han, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menegaskan dominasi di kawasan. Taiwan, di sisi lain, menggunakan tekanan ini untuk memperkuat identitas nasional dan mencari dukungan internasional.

Taiwan merespons klaim ini dengan memperkuat wacananya sebagai entitas berdaulat. Pemerintah Taiwan memanfaatkan ancaman eksternal dari Tiongkok untuk memperkokoh dukungan domestik dan internasional terhadap kedaulatannya. Langkah agresif Tiongkok dengan memperbarui peta teritorialnya mengindikasikan peningkatan ketegangan di kawasan. Klaim 10 Dash Line tidak hanya berdampak pada hubungan Tiongkok-Taiwan, tetapi juga pada dinamika geopolitik regional.

Dengan munculnya 10 Dash Line, Tiongkok menunjukkan bahwa ambisinya untuk menyatukan Taiwan dengan daratan utama adalah langkah strategis yang akan terus diperjuangkan. Taiwan kini menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan kedaulatannya di tengah tekanan internasional yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana 10 Dash Line menjadi strategi penguatan pengaruh Tiongkok di Taiwan.

Tulisan ini menggunakan teori realisme ofensif John J. Mearsheimer untuk mengupas pengaruh 10 Dash Line sebagai strategi penguatan pengaruh Tiongkok di Taiwan. Realisme ofensif menyatakan bahwa kebutuhan akan keamanan, yang pada akhirnya menentukan kelangsungan hidup suatu negara, mendorong negara-negara untuk berperilaku agresif dengan maksud memaksimalkan kekuatan mereka. Menurut pandangan ini, negara tidak cenderung untuk bekerja sama kecuali dalam aliansi sementara, tetapi selalu berupaya untuk melemahkan kekuatan pesaing dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, negara cenderung bersaing dan tidak bekerja sama secara berkelanjutan (Munro, 2024).

Mearsheimer berasumsi bahwa terdapat lima hal mendasar yang mengatur bagaimana dunia internasional bekerja, yaitu: 1) Negara-negara adalah pelaku kunci dalam politik dunia dan beroperasi dalam sistem anarkis, 2) kekuatan besar selalu memiliki kemampuan militer yang bersifat ofensif, 3) negara tidak pernah dapat yakin apakah negara lain memiliki niat yang bersifat agresif terhadap mereka, 4) kekuatan besar memberikan nilai tinggi pada kelangsungan hidup, dan 5) negara-negara adalah aktor rasional yang cukup efektif dalam merancang strategi untuk memaksimalkan peluang kelangsungan hidup mereka (Mearsheimer, 2003: 29-31).

Menurut Mearsheimer, tindakan agresif Tiongkok yang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ini merupakan langkah untuk mengamankan posisi hegemoninya di Asia Pasifik (Steinsson, 2014). Dengan menambahkan garis kesepuluh, Tiongkok tidak hanya menegaskan kembali klaim historisnya tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada Taiwan dan negara-negara lain bahwa Tiongkok bertekad untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Langkah ini sejalan dengan pandangan realisme ofensif yang menganggap bahwa negara akan selalu mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya dan mengurangi ancaman dari pesaing.

Klaim Tiongkok atas wilayah Laut China Selatan, termasuk Taiwan, mencerminkan upaya untuk menegaskan kembali klaim historis berdasarkan identitas nasional Tiongkok. Bagi Tiongkok, Taiwan bukan sekadar wilayah strategis tetapi juga bagian integral dari sejarah dan kebudayaan nasionalnya. Kebijakan 10 Dash Line, yang diperbarui dengan penambahan garis kesepuluh pada 2023, tidak hanya berfungsi sebagai simbol klaim teritorial tetapi juga sebagai alat diplomasi nasional untuk menekankan posisi Tiongkok atas Taiwan di hadapan komunitas internasional.

Langkah agresif Tiongkok di kawasan ini tidak hanya ditujukan untuk menegaskan klaim teritorial, tetapi juga untuk meredam upaya Taiwan memperkuat posisinya di panggung internasional. Dengan memanfaatkan nasionalisme sebagai elemen utama dalam kebijakan ini, Tiongkok mengartikulasikan Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Rakyat Tiongkok. Pandangan ini mencerminkan bagaimana nasionalisme berperan penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Tiongkok, dengan menempatkan Taiwan sebagai simbol penting dari persatuan nasional.

Dalam pandangan realisme ofensif, tindakan Tiongkok seperti latihan militer dan penegakan klaim wilayah tidak hanya merupakan bagian dari strategi keamanan tetapi juga upaya untuk memperkuat solidaritas nasional. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Tiongkok tidak akan mundur dari klaim historisnya atas Taiwan dan Laut China Selatan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengukuhkan kekuatan Tiongkok di kawasan Asia Pasifik tetapi juga memperkuat narasi nasionalisme yang menempatkan integrasi wilayah sebagai isu fundamental dalam politik domestik Tiongkok.

Penelitian ini memfokuskan pada analisis strategis 10 Dash Line yang digunakan oleh Tiongkok dalam konteks konflik dengan Taiwan, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggali dinamika dan implikasi dari fenomena ini dalam kerangka hubungan internasional. Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian merupakan metode yang fokus pada pengamatan dan deskripsi fenomena sosial secara mendalam tanpa intervensi dari peneliti (Maxwell, 2013: 30). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penggunaan 10 Dash Line sebagai alat geopolitik yang mempengaruhi kebijakan eksternal Tiongkok dan reaksi internasional, terutama terhadap Taiwan. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam menghasilkan eksplanasi detail dan memahami konteks sosial dan politik yang kompleks melalui data non-kuantitatif yang berupa kata-kata, gambar, dan objek.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan sumber-sumber data sekunder yang didapat melalui proses kajian literatur seperti buku-buku, artikel ilmiah terdahulu, laporan penelitian, pendapat ahli di bidang politik dan hubungan internasional, serta berbagai publikasi media baik cetak maupun elektronik. Kajian literatur sendiri adalah suatu proses menilai dan mencerna apa yang telah diteliti sebelumnya dalam suatu bidang studi untuk memberikan dasar bagi penelitian yang sedang dijalankan (Booth et al., 2009: 86). Proses kajian literatur dilakukan melalui akses basis data online seperti JSTOR, Google Scholar, dan lain-lain, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh dan menyaring informasi relevan yang berkaitan dengan penggunaan dan dampak dari 10 Dash Line. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan tema penelitian dan kredibilitasnya dalam dunia akademis dan politik.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Realisme Ofensif John J. Mearsheimer, yang menyediakan lensa analitis untuk memahami bagaimana negara-negara besar seperti Tiongkok menggunakan kekuatan militer untuk memaksimalkan keamanan nasional mereka dalam anarki sistem internasional. Negara-negara, terutama negara besar, secara inheren mencari kekuasaan maksimal dalam sistem internasional yang anarkis untuk memastikan keamanan mereka (Mearsheimer, 2003: 32). Dalam konteks 10 Dash Line, teori ini membantu menjelaskan mengapa Tiongkok mungkin merasa perlu untuk menguatkan klaim teritorialnya secara agresif dan bagaimana 10 Dash Line mempengaruhi peta kontestasi politik internasional, terutama menyangkut Amerika Serikat sebagai pendukung utama Taiwan, dan masa depan dunia internasional pasca munculnya kekuatan hegemoni baru selain Amerika Serikat.

Dalam artikel yang ditulis oleh (Tkacik, 2018), dijelaskan bahwa tujuan utama Tiongkok dalam menerapkan kebijakan 9 Dash Line adalah untuk memperkuat klaim teritorialnya di Laut China Selatan dan menunjukkan kekuatan militernya. Kebijakan ini mencerminkan strategi Tiongkok untuk menguasai wilayah strategis guna memastikan dominasinya di kawasan Asia Pasifik. Quyet (2023) menambahkan bahwa Laut China Selatan memiliki nilai geostrategis, geopolitik, dan geo economics yang sangat penting bagi Tiongkok. Kawasan ini menjadi kunci dalam strategi maritim Tiongkok untuk melindungi kepentingan ekonominya serta untuk menyeimbangkan kekuatan dengan Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik.

Dalam artikel (Xue, 2016), dijelaskan bahwa klaim teritorial Tiongkok melalui kebijakan 9 Dash Line telah memicu kekhawatiran regional, terutama di kalangan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Taiwan, sebagai salah satu pihak yang terlibat, harus menghadapi tekanan yang lebih besar dalam mempertahankan klaimnya dan kedaulatannya di wilayah tersebut. Manurung (2017) membahas bahwa kebijakan Tiongkok ini juga berdampak pada negara-negara non-pengklaim seperti Indonesia, yang khawatir akan ancaman terhadap integritas wilayahnya dan stabilitas regional. Tiongkok sering kali menggunakan retorika xenofobia dan tindakan militer unilateral yang meningkatkan ketegangan di kawasan. Moore & Primiano (2020) menyatakan bahwa respons domestik di Tiongkok terhadap kebijakan ini sangat penting. Jika pemerintah Tiongkok mundur dari kebijakan 9 Dash Line, hal ini bisa menimbulkan biaya politik yang signifikan di dalam negeri. Kebijakan ini juga memperkuat nasionalisme dan dukungan publik terhadap pemerintahan Tiongkok. Scott (2016) menggunakan analogi Doktrin Monroe untuk menjelaskan sikap Tiongkok terhadap Laut China Selatan. Kebijakan 9 Dash Line dianggap sebagai upaya Tiongkok untuk menegaskan hegemoni regionalnya, mirip dengan bagaimana Amerika Serikat menggunakan Doktrin Monroe untuk mendominasi Belahan Barat.

Wenjuan (2018) menyoroti bahwa terdapat perdebatan strategis di dalam negeri Tiongkok mengenai pentingnya Laut China Selatan. Identitas ganda Tiongkok sebagai kekuatan regional dan kekuatan yang bangkit mempengaruhi kebijakan dan strategi mereka terhadap Laut China Selatan. Beberapa penelitian sebelumnya menjadikan 9 Dash Line oleh Tiongkok sebagai bahan kajiannya. Sedangkan, dalam penelitian ini subjek utama yang dikaji adalah 10 Dash Line yang menjadi kebijakan baru oleh Tiongkok pada tahun 2023 lalu. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan salah satu teori neo realisme yaitu realisme ofensif dari John J. Mearsheimer untuk menganalisis bahwa Tiongkok menggunakan kebijakan 10

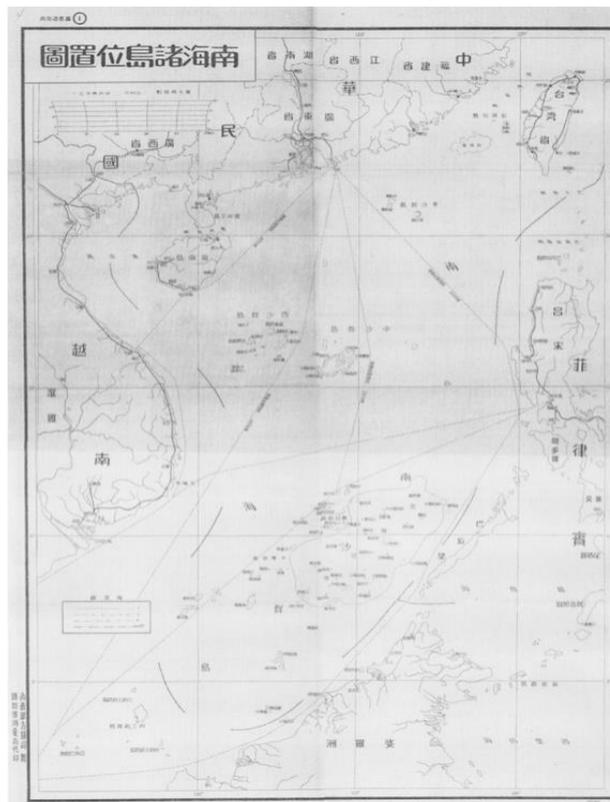
Dash Line untuk memperkuat klaim teritorialnya di wilayah Taiwan. Hal ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang fokusnya lebih luas seperti pada konflik Laut China Selatan (LCS) atau berfokus pada sengketa dengan pulau Spratly.

## 2. Pembahasan

### 2.1. Dari 9 ke 10 Dash Line

9 Dash Line adalah klaim teritorial Tiongkok atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Hal ini mencerminkan klaim historis Tiongkok atas Laut China Selatan, termasuk Kepulauan Spratly dan Paracel, serta berbagai fitur maritim lainnya, di perairan yang sangat strategis dan kaya sumber daya alam. Klaim ini didasarkan pada peta yang dibuat oleh pemerintah Nasionalis Tiongkok sekarang Taiwan pada tahun 1947 (Chapman, 2016: 146). Peta ini awalnya memuat sebelas garis putus-putus yang menunjukkan wilayah maritim yang dianggap sebagai bagian dari yurisdiksi historis Tiongkok (Wang et al., 2017). Dasar utama klaim ini adalah aktivitas maritim tradisional, seperti perikanan dan navigasi, yang telah dilakukan oleh penduduk Tiongkok sejak zaman Dinasti Han (206 SM – 220 M) (Zhaoming, 2014: 1229).

**Peta 1** Peta Awal 11 Dash Line



**Sumber :** (Wang et al., 2017)

Pada 1953, peta yang awalnya memuat sebelas garis putus-putus mengalami perubahan ketika dua garis dihapus dari wilayah Teluk Tonkin, sehingga muncul apa yang kini dikenal sebagai *Nine-Dash Line* (Gao & Jia, 2013: 103). Perubahan ini dianggap sebagai hasil dari kesepakatan bilateral antara Tiongkok dan Vietnam. Meskipun demikian, batas maritim yang didefinisikan oleh garis-garis ini tetap tidak memiliki kejelasan hukum mengenai status

perairan yang dilingkupinya, apakah dianggap sebagai laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), atau zona yurisdiksi lainnya.

Deklarasi resmi pertama Tiongkok atas klaim maritimnya muncul pada 4 September 1958 melalui Deklarasi Laut Teritorial (Zou, 2005: 5). Dalam dokumen ini, Tiongkok menyatakan bahwa wilayah lautnya mencakup wilayah daratan Tiongkok, pulau-pulau pesisir, serta kepulauan yang berada di Laut China Selatan, yaitu Dongsha, Xisha, Zhongsha, dan Nansha (Gao & Jia, 2013: 108). Tiongkok mengklaim kedaulatan penuh atas wilayah-wilayah tersebut, termasuk perairan di sekitarnya sejauh 12 mil laut dari garis dasar. Klaim ini menjadi pijakan awal upaya resmi Tiongkok untuk mengukuhkan kedaulatan di Laut China Selatan.

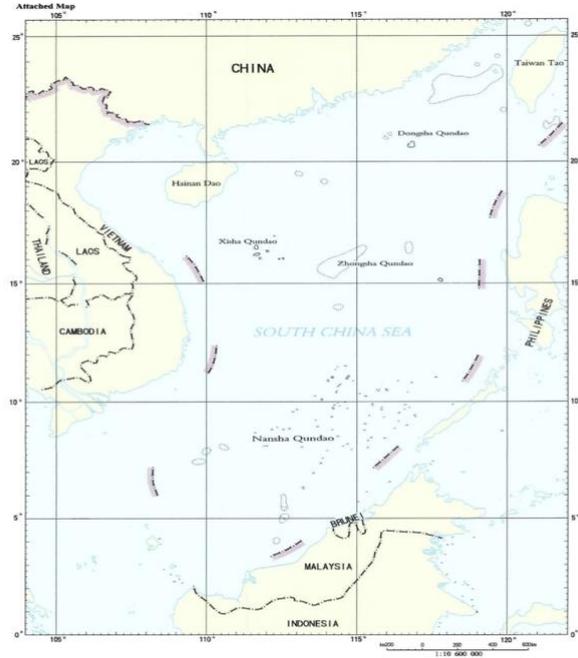
Pada 1992, Tiongkok kembali memperkuat klaim ini melalui undang-undang *Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone*, yang mencantumkan kepulauan di Laut China Selatan, termasuk Paracel dan Spratly, sebagai bagian dari wilayah teritorialnya (Kim, 1994: 894). Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa wilayah-wilayah tersebut berada di bawah kedaulatan penuh Tiongkok. Namun, undang-undang ini tidak memberikan kejelasan lebih lanjut tentang bagaimana Nine-Dash Line diintegrasikan ke dalam klaim maritim berdasarkan hukum internasional (Scott, 2016: 7).

Pada 1998, Tiongkok memperkenalkan konsep "hak historis" melalui *Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act*, yang menyebutkan bahwa klaim hak historis Tiongkok tidak terpengaruh oleh ketentuan ZEE dan landas kontinen yang diatur oleh UNCLOS (Gao & Jia, 2013: 103). Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak secara jelas mendefinisikan wilayah atau jenis hak historis yang dimaksud, sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam (Keyuan, 2001: 160). Konsep ini terus menjadi dasar klaim Tiongkok atas Laut China Selatan dan sering dikaitkan dengan aktivitas historis nelayan Tiongkok di wilayah tersebut. Upaya Tiongkok untuk menginternasionalisasi klaimnya dimulai pada 7 Mei 2009, ketika Tiongkok mengirimkan nota diplomatik kepada PBB (Gao & Jia, 2013: 106). Nota tersebut menanggapi pengajuan batas landas kontinen oleh Malaysia dan Vietnam kepada Komisi Batas Landas Kontinen. Dalam nota tersebut, Tiongkok menyatakan bahwa mereka memiliki "kedaulatan yang tidak dapat diganggu gugat" atas kepulauan di Laut China Selatan dan perairan terkait, serta memiliki hak dan yurisdiksi atas wilayah tersebut, termasuk dasar laut dan subsoilnya (People's Republic of China, 2009). Tiongkok melampirkan peta Nine-Dash Line sebagai referensi visual, yang membuat klaim ini semakin kontroversial karena dianggap tidak sejalan dengan UNCLOS.

Sengketa hukum terkait Nine-Dash Line memuncak pada 2013 ketika Filipina membawa kasus ini ke Permanent Court of Arbitration (PCA) di bawah mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS (Jones, 2016: 78). Filipina menantang klaim Tiongkok atas perairan di dalam Nine-Dash Line, dengan argumen bahwa klaim tersebut melanggar hak-hak Filipina di ZEE-nya (Yee, 2014: 665). Pada 2016, PCA memutuskan bahwa Nine-Dash Line tidak memiliki dasar hukum internasional, dan klaim hak historis Tiongkok tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS (Hongbin & Ullah, 2022: 72-73). Tribunal menyatakan bahwa aktivitas Tiongkok di Laut China Selatan seperti pembangunan pulau buatan dan penghalangan aktivitas nelayan Filipina melanggar hak berdaulat negara-negara lain di wilayah tersebut. Keputusan PCA menyebut bahwa tidak ada fitur maritim di Kepulauan Spratly yang memenuhi kriteria sebagai "pulau" yang dapat menghasilkan ZEE atau landas kontinen. Sebagian besar fitur

hanya berupa elevasi pasang-surut rendah (low-tide elevations) atau batu karang yang hanya berhak atas laut teritorial 12 mil laut (Reed & Wong, 2016).

**Peta 2** Peta 9 Dash Line



**Sumber:** (People's Republic of China, 2009)

**Peta 3** Peta Baru 10 Dash Line



**Sumber:** (Japan Forward, 2023)

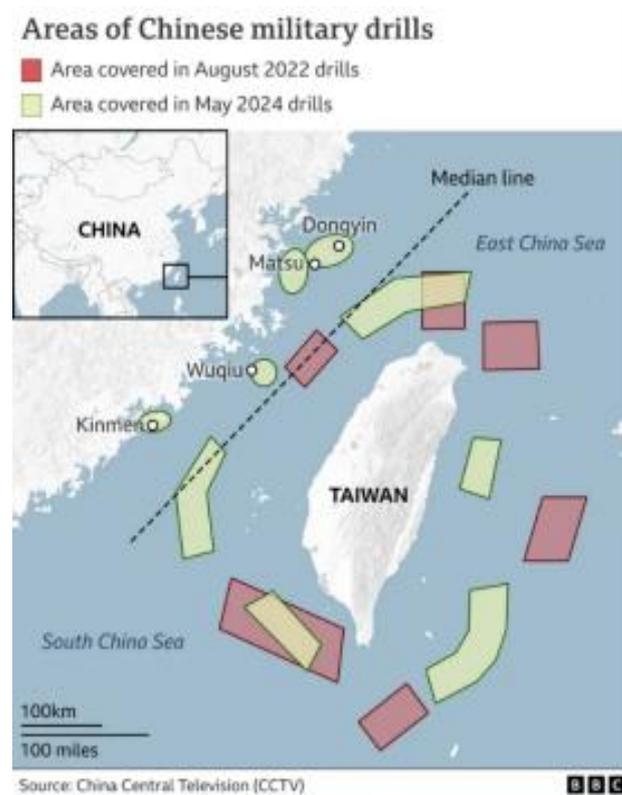
Setelah persengketaan tentang garis putus-putus Tiongkok yang terjadi selama bertahun-tahun tidak menjadikan negara ini gentar sedikitpun dalam melakukan klaim historis miliknya. Tiongkok mengabaikan masalah-masalah yang sempat timbul sebelumnya akibat dari klaim ini dan masih terus melanjutkan aktivitasnya. Pada akhir Agustus 2023, Tiongkok merilis peta terbaru yang memperkenalkan 10 Dash Line yang secara resmi menambahkan satu garis tambahan yang mencakup Taiwan sebagai bagian dari klaim teritorialnya (Shigeki, 2024). Penambahan garis kesepuluh ini mengindikasikan bahwa Tiongkok tidak hanya mengklaim wilayah Laut China Selatan, tetapi juga mengklaim kedaulatan atas Taiwan yang selama ini merupakan daerah terpisah dengan pemerintahan dan identitas politiknya sendiri.

## ***2.2. Situasi Tiongkok-Taiwan Pasca 10 Dash Line***

Tiongkok sering menimbulkan ketegangan di Taiwan dengan melakukan berbagai ancaman yang dilakukan di dekat Taiwan. Setahun belakangan Tiongkok tercatat melakukan intervensi ke Taiwan dengan berbagai macam cara. Pada Agustus 2023 misalnya Tiongkok menerbangkan Drone TB-001 yang melintasi garis Tengah selat Taiwan yang menjadi penghalang tidak resmi kedua negara tetapi akhir-akhir ini dilalui oleh Tiongkok. Balon udara mata-mata Tiongkok juga beberapa kali terdeteksi mendekati Taiwan. Dilansir dari Voice of America Kementerian Pertahanan Taiwan sudah mendeteksi lebih dari 26 balon sejak Desember 2023. Tiongkok berusaha memberi sinyal bahwa mereka tidak akan segan untuk mengintervensi wilayah Taiwan (Chung, 2024).

Namun yang menjadi menarik adalah pada awal tahun 2024 Taiwan telah menyelenggarakan pemilu. Hal tersebut sangat menarik untuk dilihat karena presiden terpilih akan menentukan arah politik Taiwan kedepannya. Pemilu Taiwan telah dilaksanakan pada 13 Januari 2024 lalu, baik itu Beijing dan Washington sama-sama memantau pemilu ini berlangsung. Dilansir dari Kompas Pemerintah Tiongkok memberi himbuan kepada pemilih di Taiwan agar menggunakan hak pilihnya dengan tepat jika ingin menghindari konflik militer dengan Tiongkok (Sarwindaningrum, 2024). Perlu diketahui terdapat tiga kandidat yang akan memperebutkan kursi presiden Taiwan. Lai Ching-Te dari Democratic Progressive Party (DPP), Wali Kota New Taipei Hou Yu-ih dari partai oposisi Kuomintang (KMT), dan mantan Wali Kota Taipei Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan (TPP). Dan berdasarkan data dari Central Election Commission (CEC) Taiwan, Lai unggul dengan memperoleh suara 5 juta dengan persentase 40% suara yang didapatkannya. Dengan begitu Lai secara resmi menjadi presiden terpilih Taiwan 2024-2028.

Terpilihnya Lai sebagai presiden terbaru Taiwan membuat ketegangan semakin besar. Lai terkenal dengan gagasannya yang pro kemerdekaan Taiwan yang menjabat sebagai Wakil Presiden pada masa kepemimpinan Tsai Ing-wen. Tiongkok sangat getol mengkritik Lai karena gagasannya yang pro kemerdekaan. Terbaru, Angkatan Bersenjata Darat, Laut, dan Udara Tiongkok melakukan latihan militer di sekitar Taiwan pada Kamis, 23 Mei 2024. China menyebut latihan tersebut sebagai strong punishment terhadap gerakan separatis di Taiwan. Latihan ini dilakukan 3 hari setelah Presiden Lai dikukuhkan sebagai presiden terpilih selanjutnya meneruskan pertahanan Presiden Tsai (Ng & Wingfield-Hayes, 2024). Latihan dilakukan oleh militer China dengan mengepung pulau Taiwan.

**Peta 4** Perbandingan Area Latihan Militer China pada Agustus 2022 dan Mei 2024

**Sumber:** (Kelly Ng & Wingfield-Hayes, 2024)

Latihan ini melibatkan berbagai operasi lintas-domain, termasuk serangan laut, serangan darat, pertahanan udara, dan anti-kapal selam. PLA (People's Liberation Army) menggunakan latihan ini untuk menguji kemampuan tempur terkoordinasi dan memberikan peringatan terhadap "tindakan separatis Taiwan" serta campur tangan asing, sejalan dengan arahan Xi Jinping untuk meningkatkan kesiapan tempur PLA. Dengan peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok menjadi 1,67 triliun yuan (sekitar USD 231,36 miliar) pada 2024, latihan ini menunjukkan prioritas tinggi Tiongkok pada penguatan militer di sekitar Taiwan, terutama dalam menghadapi dukungan internasional terhadap Taiwan dan potensi pro-kemerdekaan (Jash, 2024).

Peta diatas menggambarkan persebaran latihan militer yang dilakukan oleh Tiongkok. Tiongkok melakukan operasi "pengepungan" pertamanya pada Agustus 2022, menyusul kunjungan bersejarah Ketua DPR AS saat itu Nancy Pelosi, yang menyimulasikan blokade pulau utama Taiwan dengan kapal, pesawat terbang, dan serangan rudal. Tensi ketegangan naik lagi ketika Presiden dari Partai Progresif Demokratik terpilih. Tiongkok melabeli Presiden Lai sebagai seorang separatis dan troublemaker. Kantor Kepresidenan Taiwan menyayangkan atas tindakan provokatif Tiongkok. Mereka menyebutnya sebagai Tindakan provokatif yang mengancam demokrasi dan kebebasan Taiwan. Tiongkok menganggap latihan tersebut secara hukum sah dan diperlukan guna menindak arogansi gerakan separatis dan mencegah intervensi campur tangan kekuatan eksternal (Alamsyah, 2024).

Adapun Latihan militer yang dilakukan oleh Tiongkok telah dilakukan semenjak Maret 2018 hingga Oktober 2024. Berikut detail informasi mengenai Latihan militer tersebut:

**Tabel 1** Latihan Militer Tiongkok di Sekitar Taiwan (2018-2024)

<b>Waktu</b>	<b>Nama Latihan</b>	<b>Jenis Latihan</b>	<b>Fitur Utama</b>	<b>Konteks</b>	<b>Tujuan Strategis</b>
Maret 2018	Latihan tembak langsung	Angkatan laut dan udara; latihan langsung	Simulasi pendaratan amfibi dan blokade	Menyusul penandatanganan US Taiwan Travel Act	Menyatakan penentangan terhadap hubungan AS-Taiwan
Juli 2019	Latihan bersama angkatan laut dan udara	Manuver udara dan laut	Operasi udara dan laut bersama dekat Taiwan	Bagian dari siklus latihan tahunan PLA	Menunjukkan kemampuan operasional gabungan PLA
Agustus 2020	Latihan tembak langsung	Angkatan laut dan udara; latihan langsung	Serangan simulasi di Taiwan; uji coba rudal	Ketegangan AS-Taiwan selama pemerintahan Trump	Tekanan psikologis terhadap Taiwan
April 2021	Latihan pendaratan gabungan	Pelatihan serangan amfibi	Latihan pendaratan pantai dan operasi serangan	Setelah transit Angkatan Laut AS di Selat Taiwan	Menunjukkan kekuatan dan peringatan kepada Taiwan dan AS
Agustus 2022	Latihan terbesar sepanjang masa	Latihan militer skala penuh	Simulasi blokade, peluncuran rudal di atas Taiwan; perang siber	Respons atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan	Kesiapan komprehensif untuk skenario invasi Taiwan
Oktober 2022	Latihan penerbangan militer	Sorti angkatan udara	Banyak jet tempur dan pembom mengitari Taiwan	Ketegangan pasca-kunjungan Pelosi dan kehadiran militer AS	Intimidasi, menguji pertahanan udara Taiwan

April 2023	Latihan Sharp dan Sword United Sword Allied	Latihan multi-cabang	Simulasi pengepungan Taiwan, uji coba rudal, operasi gabungan darat dan udara	Respons atas pertemuan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy	Menunjukkan kemampuan PLA untuk mengepung dan mengisolasi Taiwan
Juli 2023	Latihan malam hari	Latihan udara dan laut	Latihan tempur malam hari	Dukungan militer AS yang meningkat untuk Taiwan	Meningkatkan kesiapan tempur, menunjukkan kemampuan operasi malam
Agustus 2023	Latihan	Latihan udara dan laut	Latihan tempur dengan pesawat, kapal angkatan laut, dan sistem rudal berbasis darat	Respons atas kunjungan Wakil Presiden Taiwan Lai Ching-te ke AS	Fokus pada koordinasi kapal dan pesawat untuk merebut kendali ruang udara dan laut, serta menguji kemampuan tempur
Mei 2024	Latihan <i>Joint Sword-2024A</i>	Latihan militer skala penuh	Fokus pada serangan presisi gabungan, uji coba rudal, dan operasi drone	Respons atas pidato pelantikan Presiden Taiwan Lai Ching-te	Kesiapan tempur gabungan laut-udara, serangan presisi, dan operasi terintegrasi untuk menguji kemampuan tempur
Oktober 2024	Latihan <i>Joint Sword-2024B</i>	Latihan militer gabungan	Latihan serangan darat, laut, dan udara; simulasi pengepungan dan	Respons atas pidato Presiden Taiwan William Lai tentang "melawan aneksasi"	Menguji kemampuan operasi gabungan terintegrasi PLA, meningkatkan intimidasi dan

			blokade pelabuhan		memproyeksikan kekuatan terhadap Taiwan
--	--	--	-------------------	--	---

**Sumber:** (Jash, 2024 & Hayes & Perera, 2024)

Tindakan ini, dengan dimulainya klaim 10 Dash Line menjadi tanda dari munculnya ketegangan yang lebih serius antara Tiongkok dan Taiwan. Hal tersebut dapat dilihat lagi Tiongkok yang mulai berani meningkatkan intensitas aktivitas militer di kawasan Selat Taiwan setelah terpilihnya Presiden Lai. Latihan militer ini tidak hanya sebagai unjuk kekuatan, tetapi juga sebagai sinyal tegas bahwa Tiongkok tidak akan mundur dari upayanya untuk mengintegrasikan Taiwan kembali ke dalam wilayahnya.

Aktivitas militer ini juga memperkuat tekanan psikologis terhadap Taiwan, yang harus terus meningkatkan kesiagaan militernya dan mencari dukungan internasional untuk menghadapi potensi konflik. Walaupun demikian, seperti yang tertera pada tabel di atas, semua tindakan latihan militer Tiongkok merupakan reaksi dari aksi Taiwan yang sedang menghimpun kekuatannya dalam menghadapi “saudara lamanya” itu. Namun keadaan dilematis Taiwan ini sedikit terobati oleh salah satu sekutu terdekatnya, yaitu Amerika Serikat. Tindakan agresif Tiongkok ini memicu respons dari komunitas internasional, terutama Amerika Serikat, yang semakin memperkuat aliansi dengan Taiwan dan memberikan dukungan militer serta diplomatik untuk menahan tekanan dari Tiongkok.

Situasi di Selat Taiwan terus menjadi fokus utama dalam geopolitik kawasan Asia-Pasifik, terutama setelah Tiongkok secara lebih agresif memproyeksikan pengaruhnya melalui latihan militer dan implementasi klaim kedaulatan, termasuk pengenalan 10 Dash Line yang memperkuat posisi mereka di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Taiwan, telah berulang kali menekankan komitmennya terhadap pertahanan Taiwan dalam rangka mengimbangi kekuatan militer Tiongkok yang semakin besar. Dukungan ini diwujudkan melalui penjualan senjata yang signifikan, bantuan teknis, dan pelatihan militer yang diberikan kepada Angkatan Bersenjata Taiwan. Pada tahun 2023, Pemerintah AS menyetujui paket bantuan militer sebesar 8 miliar dolar AS, yang mencakup peralatan pertahanan mutakhir seperti sistem pertahanan rudal, pesawat tempur, serta pelatihan pasukan darat dan laut Taiwan (Katz, 2023).

Selain Amerika Serikat, aliansi multilateral seperti AUKUS (Australia, United Kingdom, and United States) dan Quad (Quadrilateral Security Dialogue yang terdiri dari Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia) juga berperan penting dalam merespons ekspansi kekuatan militer Tiongkok. Kedua aliansi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik, dengan menekankan pada pentingnya kebebasan navigasi dan hukum internasional di Laut Cina Selatan dan sekitarnya (Sharma, 2023). Meskipun demikian, upaya ini seringkali dibaca oleh Tiongkok sebagai provokasi, sehingga memperparah ketegangan yang ada.

Taiwan di bawah kepemimpinan Presiden Lai Ching-te menghadapi tantangan yang signifikan dalam mempertahankan kedaulatannya di tengah tekanan dari Tiongkok. Salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah Taiwan adalah memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara yang mendukung kedaulatan mereka, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara anggota Uni Eropa. Presiden Lai telah aktif melakukan diplomasi publik melalui berbagai forum internasional, meskipun Taiwan belum memiliki status resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Taiwan juga terus memperkuat hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara dan kawasan Indo-Pasifik. Hal ini disampaikan oleh Presiden Lai di dalam forum IPAC Taipei Summit 2024 dengan menyatakan bahwa Taiwan akan bekerja sama dengan negara demokrasi lainnya untuk bertahan dari ancaman ekspansi otoritarianisme (Kang, 2024). Selain itu, Presiden Lai juga menghadiri Ketagalan Forum yang membahas mengenai keamanan Indo-Pasifik dan secara khusus menyampaikan tentang pentingnya menjaga keamanan Selat Taiwan.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua negara mengambil sikap tegas dalam mendukung Taiwan. Beberapa negara, terutama di kawasan Asia, lebih memilih untuk mempertahankan hubungan baik dengan Tiongkok mengingat ketergantungan ekonomi yang besar pada Negeri Tirai Bambu tersebut. Kebijakan luar negeri "One China Policy" yang dipegang teguh oleh Tiongkok membuat negara-negara ini enggan untuk secara terbuka mendukung Taiwan, sehingga membuat posisi Taiwan semakin terisolasi di panggung internasional. Meskipun demikian, dukungan diplomatik yang diberikan oleh negara-negara Barat memberikan Taiwan ruang untuk bermanuver dan memperkuat legitimasi internasional mereka.

Walaupun 10 Dash Line dapat menjadi pemicu pertama bagi konflik yang lebih serius, namun kemungkinan pecahnya konfrontasi langsung antara militer Tiongkok dan Taiwan dapat dikatakan tidak akan terjadi di waktu yang dekat ini (Wirjawan, 2024). Hal ini dikarenakan jika perang bersenjata pecah antara kedua belah pihak tersebut, maka rantai pasokan global akan terganggu. Bahkan dengan adanya ketegangan yang mulai memuncak antara Tiongkok dan Taiwan, sudah memberikan gangguan bagi rantai pasokan global di tahun 2024 (Everstream Team, 2023).

Pada akhirnya, 10 Dash Line melibatkan identitas nasional Tiongkok yang erat kaitannya dengan konsep keutuhan wilayah yang tidak hanya mengarah pada tujuan untuk memperluas kekuasaan, tetapi lebih kepada upaya untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan negara. Realisme ofensif menekankan pada ambisi untuk mendominasi dan mengamankan kekuasaan, dalam kasus Tiongkok dan Taiwan, klaim ini lebih banyak terkait dengan upaya untuk mempertahankan Taiwan sebagai bagian dari keutuhan negara yang dilihat Tiongkok sebagai bagian dari sejarah panjang dan identitas nasional mereka.

Dalam sistem internasional yang anarkis, seperti yang digambarkan dalam realisme ofensif, negara-negara beroperasi tanpa adanya otoritas yang lebih tinggi untuk mengatur interaksi mereka. Dalam dunia yang tidak terorganisir ini, negara-negara, termasuk Tiongkok, selalu berupaya untuk memastikan kelangsungan hidup dan keamanan nasional mereka. Taiwan, yang dipandang oleh Tiongkok sebagai bagian integral dari wilayahnya, tidak hanya merupakan wilayah geografis, tetapi juga simbol dari identitas nasional Tiongkok. Mengingat bahwa negara-negara besar seperti Tiongkok memiliki kemampuan militer ofensif, mereka

cenderung menilai bahwa kelangsungan hidup mereka bergantung pada kemampuan untuk mempertahankan atau memperkuat wilayah yang mereka anggap penting. Dalam hal ini, Taiwan adalah kunci bagi integritas nasional Tiongkok, sehingga kebijakan seperti 10 Dash Line dan latihan militer di sekitar Taiwan berfungsi sebagai langkah strategis untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Namun, meskipun Tiongkok secara jelas melihat Taiwan sebagai bagian dari keutuhan wilayahnya, klaim tersebut tidak diterima oleh banyak negara lain, yang berusaha untuk mencegah ekspansi Tiongkok melalui berbagai saluran diplomatik dan militer. Ketegangan ini mencerminkan sistem anarkis di mana negara-negara besar, terutama yang memiliki kemampuan militer ofensif, merasa bahwa mereka harus menjaga kepentingan dan kelangsungan hidup mereka dengan cara yang terlihat sebagai agresi atau ancaman terhadap negara lain. Salah satu prinsip penting yang perlu dimiliki oleh negara besar seperti Tiongkok adalah bahwa negara tidak pernah dapat yakin apakah negara lain memiliki niat yang bersifat agresif terhadap mereka. Hal ini berlaku dalam hubungan antara Tiongkok dan Taiwan, terutama setelah perubahan kebijakan Tiongkok pada 2023 dengan pengenalan 10 Dash Line yang memperluas klaim mereka hingga mencakup Taiwan. Meskipun Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian integral dari negara mereka, kenyataannya Taiwan memiliki identitas politik yang terpisah dan sistem pemerintahan yang independen. Ketidakpastian mengenai apakah Taiwan akan tetap berada di bawah pengaruh Tiongkok atau tetap mempertahankan status quo mengarah pada tindakan militer ofensif. Dalam hal ini, Tiongkok tidak hanya menghadapi ancaman dari Taiwan tetapi juga dari intervensi negara lain, terutama Amerika Serikat yang selalu mendukung Taiwan dalam berbagai aspek. Ketidakpastian mengenai niat negara-negara lain inilah yang mendorong Tiongkok untuk meningkatkan kehadiran militer dan melakukan latihan-latihan militer besar di sekitar Taiwan. Latihan militer ini bertujuan untuk memastikan bahwa Tiongkok memiliki kekuatan ofensif yang cukup besar untuk menghadapi potensi ancaman terhadap klaim teritorialnya, baik dari Taiwan maupun dari negara-negara yang mendukung Taiwan.

Tiongkok, sebagai kekuatan besar, memberikan nilai tinggi pada kelangsungan hidup dan keamanan nasional. Taiwan dengan posisinya yang strategis dan memiliki sejarah panjang, dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keutuhan negara Tiongkok. Perlu diketahui bahwa negara-negara besar, terkhusus kepada Tiongkok yang tidak hanya sedang mengalami gesekan dari dunia luar tapi juga gesekan dari entitas internal yang dianggap sebagai wilayah kedaulatannya, tidak hanya berfokus pada perluasan kekuasaan, namun lebih kepada mempertahankan eksistensinya melalui penguasaan wilayah-wilayah yang penting. Dengan demikian, kebijakan 10 Dash Line dan upaya pengintegrasian Taiwan tidak hanya mencerminkan ambisi regional, tetapi juga memastikan integritas negara dalam menghadapi potensi ancaman terhadap kedaulatan Tiongkok.

Kekuatan besar seperti Tiongkok cenderung untuk menggunakan militer secara ofensif jika mereka merasa ada ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka. Taiwan menjadi titik fokus utama dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, dan tindakan Tiongkok yang agresif—seperti pembangunan pulau-pulau buatan di Laut China Selatan, serta latihan militer yang terus dilakukan di sekitar Taiwan—menunjukkan komitmen negara tersebut untuk mempertahankan wilayah yang dianggap historis dan strategis. Ketegasan dalam kebijakan ini mencerminkan

nilai tinggi yang diberikan oleh Tiongkok untuk menjaga kelangsungan hidupnya sebagai negara besar.

Namun, meskipun strategi Tiongkok dirancang untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas nasional, rasionalitas Tiongkok juga melibatkan perhitungan terhadap resiko yang ditimbulkan dari potensi konfrontasi dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, meskipun Tiongkok menggunakan kekuatan ofensif untuk menunjukkan ketegasan, mereka juga harus merancang strategi yang mengurangi kemungkinan perang terbuka dengan negara-negara lain. Tiongkok harus mempertimbangkan dukungan internasional terhadap Taiwan dan ancaman terhadap stabilitas regional jika konfrontasi bersenjata terjadi.

Peran Amerika Serikat sebagai penyeimbang kekuatan di kawasan memastikan bahwa Tiongkok tidak dapat mencapai tujuannya tanpa tantangan. Dukungan militer dan diplomatik Amerika Serikat terhadap Taiwan, serta kemitraan dengan negara-negara lain di kawasan melalui aliansi seperti AUKUS dan Quad, menghalangi ekspansi kekuatan Tiongkok dan menjaga stabilitas regional. Dalam konteks ini, meskipun Tiongkok berusaha untuk memperkuat posisinya melalui kebijakan 10 Dash Line, kehadiran Amerika Serikat dan sekutunya memastikan bahwa upaya Tiongkok untuk mendominasi kawasan akan terus menghadapi perlawanan yang signifikan.

Selain itu, Faktor lain yang menahan pecahnya perang adalah ketergantungan ekonomi yang kuat antara Tiongkok dan negara-negara besar lainnya, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Konflik berskala besar akan mengganggu rantai pasokan global dan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian Tiongkok, yang semakin tergantung pada perdagangan internasional. Selain itu, ancaman sanksi ekonomi dari negara-negara Barat juga menjadi pertimbangan penting bagi Tiongkok dalam menentukan langkah-langkah militernya terhadap Taiwan.

Namun, ancaman konfrontasi militer tetap ada, terutama jika Tiongkok merasa bahwa posisinya di kawasan semakin terancam. Situasi ini dapat menjadi lebih berbahaya jika terjadi salah perhitungan oleh salah satu pihak, yang dapat memicu eskalasi yang lebih serius. Oleh karena itu, komunitas internasional perlu berupaya mencari solusi diplomatik untuk mencegah pecahnya konflik, sambil memastikan bahwa Taiwan tetap memiliki dukungan yang cukup untuk mempertahankan kedaulatannya. Walaupun, dominasi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik tetap terhalang oleh kehadiran Amerika Serikat yang terus berusaha menjaga keseimbangan kekuatan dan memastikan bahwa stabilitas regional tetap terjaga. Analisis ini menunjukkan bahwa ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan serta pengaruh negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik mencerminkan dinamika geopolitik yang kompleks dan persaingan kekuatan besar yang terus berlanjut, dengan kebijakan 10 Dash Line sebagai salah satu instrumen utama dalam strategi Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di Taiwan.

### **3. Kesimpulan**

Kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan yang tercermin dalam klaim 10 Dash Line tidak hanya mencerminkan ambisi regional tetapi juga upaya untuk mempertahankan integritas nasional dan identitas negara. Tiongkok memandang Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya, dan kebijakan ini didorong oleh prinsip realisme ofensif di mana negara besar

berusaha memastikan kelangsungan hidupnya dengan menguasai wilayah yang vital. Latihan militer yang intensif di sekitar Taiwan, serta tindakan agresif lainnya, menunjukkan komitmen Tiongkok untuk mempertahankan klaim teritorialnya, sekaligus mengirimkan pesan yang kuat kepada komunitas internasional.

Namun, meskipun Tiongkok berusaha memperkuat posisi melalui penggunaan kekuatan militer, kebijakan ini tidak tanpa risiko. Konfrontasi dengan negara-negara besar terutama Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya membawa potensi dampak besar terhadap stabilitas kawasan dan global. Peran Amerika Serikat sebagai penyeimbang kekuatan di kawasan Indo-Pasifik memastikan bahwa ekspansi militer Tiongkok akan terus dihadapkan pada tantangan diplomatik dan militer yang signifikan. Aliansi-aliansi seperti AUKUS dan Quad, serta dukungan berkelanjutan kepada Taiwan menjaga keseimbangan kekuatan dan menghalangi upaya Tiongkok untuk mendominasi wilayah tersebut tanpa perlawanan.

Meskipun ketegangan meningkat, kemungkinan pecahnya konflik besar tetap terbatas oleh ketergantungan ekonomi global, di mana Tiongkok sangat bergantung pada perdagangan internasional dan interaksi ekonomi dengan negara-negara besar. Ancaman sanksi ekonomi yang dapat diberlakukan oleh negara-negara Barat menjadi faktor penahan lainnya bagi Tiongkok dalam mengimplementasikan kebijakan militer yang lebih agresif. Oleh karena itu, meskipun ancaman konfrontasi tetap ada, diplomasi internasional dan upaya menjaga stabilitas regional melalui aliansi strategis menjadi kunci untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, sekaligus memastikan bahwa Taiwan dapat terus mempertahankan kedaulatannya di tengah tekanan yang terus meningkat dari Tiongkok.

## Daftar Pustaka

- Alamsyah, I. E. (2024). *Militer China: Gelar Latihan di Wilayah Taiwan “Sah dan Diperlukan.”* Republika. <https://internasional.republika.co.id/berita/se00bi349/militer-china-gelar-latihan-di-wilayah-taiwan-sah-dan-diperlukan>
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2009). *The craft of research*. University of Chicago press.
- Chung, T. (2024). *Chinese Balloons Aim to Influence Taiwan’s Election, Experts Say*. VOA News. <https://www.voanews.com/a/chinese-balloons-aim-to-influence-taiwan-s-election-experts-say-/7431705.html>
- Chapman, B. (2016). China’s nine-dashed map: Continuing maritime source of geopolitical tension. *Geopolitics, History, and International Relations*, 8(1), 146–168.
- Clayman, T. (2023). *China’s New Map: The 10-Dash Line*. Boston Political Review. <https://www.bostonpoliticalreview.org/post/china-s-new-map-the-10-dash-line>
- Everstream Team. (2023). *China-Taiwan tensions to disrupt supply chain in 2024*. Everstream Analytics. <https://www.everstream.ai/articles/china-taiwan-tensions-disrupt-supply-chain-2024/>
- Gao, Z., & Jia, B. B. (2013). The nine-dash line in the South China Sea: History, status, and implications. *American Journal of International Law*, 107(1), 98–123.
- Goldstein, S. M. (2015). *China and Taiwan*. John Wiley & Sons.

- Hongbin, D., & Ullah, I. (2022). THE SOUTH CHINA SEA'S 9 DASH LINE: KEY DISPUTES AND CHINA'S HISTORICAL RIGHTS CLAIMS. *Journal of Pakistan-China Studies (JPCS)*, 3(1), 67–86.
- Jash, A. (2024). *China's Military Exercises Around Taiwan: Trends and Patterns*. Global Taiwan. <https://globaltaiwan.org/2024/10/chinas-military-exercises-around-taiwan-trends-and-patterns/>
- Jones, J. L. (2016). Free the Sea: The Philippines v. China. *SAIS Review of International Affairs*, 36(1), 75–86.
- Kang, D. (2024). *Taiwan President Urges Democracies to Unite at Largest-ever Gathering of Foreign Lawmakers in Taipei*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2024/07/taiwan-president-urges-democracies-to-unite-at-largest-ever-gathering-of-foreign-lawmakers-in-taipei/>
- Keyuan, Z. (2001). Historic rights in international law and in China's practice. *Ocean Development & International Law*, 32(2), 149–168.
- Kim, H.-S. (1994). The 1992 Chinese Territorial Sea Law in the Light of the UN Convention. *International & Comparative Law Quarterly*, 43(4), 894–904.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach: An interactive approach*. sage.
- Mearsheimer, J. J. (2003). *The tragedy of great power politics (Updated edition)*. WW Norton & Company.
- Manurung, H. (2017). The Effect of People's Republic of China (PRC) Territorial Claim on South China Sea (SCS) to Indonesia (2014 - 2016). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2942220>
- Moore, G. J., & Primiano, C. B. (2020). Audience Costs and China's South China Sea Policy. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 7(3), 325–348.
- Munro, A. (2024). *John J. Mearsheimer*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/John-Mearsheimer>
- Ng, K., & Wingfield-Hayes, R. (2024). *China holds military drills around Taiwan as "strong punishment."* Bbc. <https://www.bbc.com/news/articles/cqv29gpqn1o>
- Quyet, N. H. (2023). CHINESE STRATEGY IN THE SOUTH CHINA SEA: A Growing Quest for Vital Economic and Strategic Interests. *World Affairs*, 186(3), 687–716. <https://doi.org/10.1177/00438200231181141>
- People's Republic of China. (2009). *Note Verbale*. United Nations. [https://www.un.org/depts/los/clcs\\_new/submissions\\_files/vnm37\\_09/chn\\_2009re\\_vnm.pdf](https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/chn_2009re_vnm.pdf)
- Reed, L., & Wong, K. (2016). Marine entitlements in the South China Sea: The arbitration between the Philippines and China. *American Journal of International Law*, 110(4), 746–760.
- Sarwindaningrum, I. (2024). *China Tuduh Intelijen Barat Mata-matai Program Luar Angkasa*. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/china-tuduh-intelijen-barat-matai-matai-program-luar-angkasa>
- Sharma, A. (2023). *The AUKUS Expansion: A Step Towards Bolstering Security and Stability in the Indo-Pacific*. Australian Institute of International Affairs.

- <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-aukus-expansion-a-step-towards-bolstering-security-and-stability-in-the-indo-pacific/>
- Shigeki, S. (2024). *What are China's Aims with the Ten-Dash Line in the South China Sea?* Senkaku Island Research and Commentary Site. [https://www.cas.go.jp/jp/ryodo\\_eg/kenkyu/senkaku/chapter04\\_column\\_04.html](https://www.cas.go.jp/jp/ryodo_eg/kenkyu/senkaku/chapter04_column_04.html)
- Steinsson, S. (2014). *John Mearsheimer's Theory of Offensive Realism and the Rise of China*. E-International Students. <http://www.e-ir.info/2014/03/06/john-mearsheimers-theory-of-offensive-realism-and-the-rise-of-china/>
- Scott, S. V. (2016). China's nine-dash line, international law, and the Monroe Doctrine analogy. *China Information*, 30(3), 296–311.
- Tkacik, M. (2018). Understanding China's goals and strategy in the South China Sea: bringing context to a revisionist systemic challenge – intentions and impact. *Defense & Security Analysis*, 34(4), 321–344. <https://doi.org/10.1080/14751798.2018.1529092>
- Tsang, S. (2004). *War or Peace Across the Taiwan Strait BT - Peace and Security Across the Taiwan Strait* (S. Tsang, Ed.; pp. 1–18). Palgrave Macmillan UK. [https://doi.org/10.1057/9780230524538\\_1](https://doi.org/10.1057/9780230524538_1)
- Wang, Y., Ge, C., & Zou, X. (2017). Evidence of China's sea boundary in the South China Sea. *Acta Oceanologica Sinica= Hai Yang Hsueh Pao*, 36(4), 1–12.
- Wenjuan, N. (2018). China's domestic strategic debate and confusion over the South China Sea issue. *The Pacific Review*, 31(2), 188–204. <https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1370608>
- Xue, L. (2016). South China Sea Disputes: Litmus Test for China's Peaceful Rise—How US Scholars View South China Sea Issues. *China's Rise and Changing Order in East Asia*, 217–223.
- Yee, S. (2014). The South China Sea Arbitration (The Philippines v. China): Potential Jurisdictional Obstacles or Objections. *Chinese Journal of International Law*, 13(4), 663–739.
- Zhaoming, X. (2014). The Hepu Han tombs and the maritime silk road of the Han Dynasty. *Antiquity*, 88(342), 1229–1243.
- Zou, K. (2005). *China's marine legal system and the law of the sea* (Vol. 48). Brill.
- Wirjawan, G. (2024). *Alasan Amerika Selalu Setia di Belakang Israel - John Mearsheimer | Endgame #179 (Luminaries)* [Broadcast]. Gita Wirjawan. [https://www.youtube.com/watch?v=39\\_bpaaio1U&t=4040s](https://www.youtube.com/watch?v=39_bpaaio1U&t=4040s)